

**KEPEMIMPINAN NASIONAL BERLANDASKAN PANCASILA: STRATEGI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN
TEKNOLOGI SEBAGAI PILAR PERTAHANAN SERTA ANTITESIS TERHADAP
HEGEMONI GLOBAL**

Faris Kurniawan¹, Sunandar Wahyudi², Djuli Supriono³, Aqsha Erlangga⁴, Tarsisius Susilo⁵

^{1,2,3,4,5}Sekolah Staf dan Komando TNI

Email: faris_kurniawan@gmail.com¹, sunandar_wahyudi@gmail.com²,
djuli_supriono@gmail.com³, aqsha_erlangga3@gmail.com⁴, tarsisius_susilo@gmail.com⁵

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan nasional berbasis Pancasila sebagai landasan strategis dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan teknologi strategis sebagai pilar pertahanan nasional sekaligus antitesis terhadap hegemoni global. Dinamika rivalitas Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia dalam perebutan jalur maritim, mineral kritis, dan teknologi menuntut Indonesia untuk mengembangkan model kepemimpinan yang menjunjung kedaulatan, keadilan sosial, dan keberlanjutan pembangunan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus komparatif, melalui analisis dokumen kebijakan, laporan resmi, dan publikasi akademik terkini (2020–2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan SDA harus seimbang antara kepentingan ekonomi, pertahanan, dan diplomasi; pengembangan SDM perlu terintegrasi antara pendidikan, keterampilan, dan nilai kebangsaan; serta teknologi strategis harus mendukung inovasi nasional tanpa ketergantungan eksternal. Strategi kepemimpinan berbasis Pancasila memungkinkan Indonesia memainkan peran penyeimbang (balancer) di kawasan Indo-Pasifik, memperkuat kemandirian, dan meminimalkan risiko dominasi kekuatan besar. Temuan ini menegaskan relevansi Pancasila sebagai instrumen praktis untuk membangun ketahanan nasional, kedaulatan strategis, dan kesejahteraan rakyat.

Kata Kunci: Kepemimpinan Nasional, Pancasila, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Teknologi Strategis, Hegemoni Global, Pertahanan Negara.

Abstract: This study aims to analyze Pancasila-based national leadership as a strategic foundation for managing natural resources (NR), human resources (HR), and strategic technologies as pillars of national defense while serving as an antithesis to global hegemony. The rivalry among the United States, China, and Russia over maritime routes, critical minerals, and technology requires Indonesia to develop a leadership model that upholds sovereignty, social justice, and sustainable development. The research employs a qualitative approach with a comparative case study, analyzing policy documents, official reports, and recent academic publications (2020–2024). Findings indicate that NR management must balance economic, defense, and diplomatic interests; HR development should integrate education, skills, and national values; and strategic technology must support national innovation without external dependency. Pancasila-based leadership enables Indonesia to act

as a regional balancer in the Indo-Pacific, strengthen autonomy, and mitigate the risk of great power dominance. These findings highlight the practical relevance of Pancasila in building national resilience, strategic sovereignty, and public welfare.

Keywords: *National Leadership, Pancasila, Natural Resources, Human Resources, Strategic Technology, Global Hegemony, National Defense.*

PENDAHULUAN

Selama dua dekade terakhir, dunia menyaksikan dinamika global yang semakin kompleks dengan menguatnya rivalitas strategis antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Persaingan tersebut tidak hanya mencakup aspek militer dan politik, tetapi juga perebutan sumber daya alam (SDA), penguasaan teknologi strategis, serta pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Data empiris menunjukkan bahwa sejak 2020 hingga 2023, investasi global terhadap mineral kritis meningkat tajam, khususnya nikel dan kobalt, dengan Indonesia sebagai salah satu pemain kunci karena menguasai 22% cadangan nikel dunia (USGS, 2023). Pada saat yang sama, ketergantungan global pada jalur maritim Indo-Pasifik, di mana 60% perdagangan dunia dan 40% energi global melewati kawasan tersebut, semakin menempatkan Indonesia dalam posisi strategis sebagai negara kepulauan terbesar dengan potensi maritim yang luas (UNCTAD, 2023).

Di tengah kondisi tersebut, Indonesia menghadapi dilema kepemimpinan nasional. Di satu sisi, terdapat tekanan eksternal berupa hegemoni global yang eksploitatif dan cenderung mengabaikan prinsip keadilan dalam distribusi sumber daya. Di sisi lain, kebutuhan domestik untuk memperkuat kemandirian ekonomi, meningkatkan daya saing teknologi, serta memperkuat ketahanan nasional menjadi semakin mendesak.

Tantangan ini memperlihatkan bahwa pendekatan normatif dan reaktif tidak lagi memadai, melainkan diperlukan suatu paradigma kepemimpinan yang berakar pada falsafah bangsa, yakni Pancasila, yang menekankan keseimbangan antara kepentingan nasional, tanggung jawab global, dan keberlanjutan pembangunan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti dinamika hegemoni global, baik dalam konteks penguasaan energi, sengketa maritim, maupun kompetisi teknologi (Kaplan, 2021; Medcalf, 2022; Storey, 2020).

Namun, penelitian yang secara sistematis menghubungkan falsafah Pancasila dengan strategi pengelolaan SDA, SDM, dan teknologi sebagai basis pertahanan nasional masih sangat terbatas. Padahal, perspektif ini krusial untuk menawarkan antitesis terhadap model

kepemimpinan global yang hegemonik dan eksploitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji bagaimana kepemimpinan nasional berbasis Pancasila dapat menjadi landasan strategis dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk memperkuat pertahanan sekaligus menolak dominasi eksternal. Pendekatan penelitian diarahkan untuk memetakan strategi pengelolaan SDA, SDM, dan teknologi dalam kerangka pertahanan komprehensif yang tidak hanya berfungsi menjaga kedaulatan, tetapi juga mendorong kemandirian dan keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar falsafah normatif, melainkan instrumen praktis yang relevan dalam menghadapi dinamika geopolitik kontemporer dan membangun kepemimpinan nasional yang berdaulat, adaptif, serta visioner.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai relevansi Pancasila sebagai falsafah kepemimpinan nasional dalam menghadapi hegemoni global, khususnya melalui pengelolaan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan teknologi sebagai pilar pertahanan nasional. Pendekatan kualitatif dipilih karena isu yang diteliti bersifat multidimensi, kompleks, dan melibatkan interaksi erat antara faktor politik, ekonomi, sosial, militer, serta strategi pembangunan nasional. Sejalan dengan pandangan Creswell (2021), penelitian kualitatif dipandang tepat untuk mengeksplorasi fenomena sosial-politik yang kontekstual, dinamis, serta menuntut interpretasi mendalam terhadap data yang beragam.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus komparatif, dengan fokus pada rivalitas Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia dalam perebutan sumber daya strategis, penguasaan jalur perdagangan maritim, dan penetrasi teknologi di kawasan Indo-Pasifik. Kasus-kasus ini dianalisis secara kontekstual untuk mengidentifikasi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia dalam merumuskan model kepemimpinan nasional berbasis Pancasila sebagai antitesis terhadap pola kepemimpinan global yang hegemonik dan eksploitatif.

Data dikumpulkan melalui analisis dokumen dari berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk laporan kebijakan pertahanan nasional, strategi Indo-Pasifik negara besar, doktrin pertahanan Indonesia, laporan organisasi internasional seperti ASEAN dan PBB, serta publikasi akademik dan jurnal internasional terkini (2020–2024). Untuk memastikan akurasi

dan relevansi, data tersebut divalidasi silang dengan publikasi think tank strategis, seperti CSIS, SIPRI, dan ISEAS-Yusof Ishak Institute.

Teknik pengumpulan data mengacu pada Sugiyono (2021), meliputi: (1) observasi dokumen, berupa telaah kritis terhadap kebijakan dan strategi geopolitik negara besar serta doktrin pertahanan Indonesia, dan (2) dokumentasi, berupa pengumpulan data sekunder dari laporan resmi, media kredibel, dan hasil penelitian akademik terbaru.

Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman (1994), melalui empat tahapan: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data dengan memilah informasi relevan sesuai fokus penelitian, (3) penyajian data dalam bentuk narasi tematik untuk memetakan kepentingan geopolitik dan dinamika sumber daya, serta (4) penarikan kesimpulan dengan menekankan implikasi terhadap kepemimpinan nasional berbasis Pancasila.

Untuk memperdalam temuan, digunakan teknik analisis tematik-komparatif sebagaimana dianjurkan Creswell (2021), dengan mengidentifikasi tema-tema kunci yang saling berkaitan seperti kompetisi sumber daya energi dan mineral, perebutan jalur maritim Indo-Pasifik, inovasi dan transfer teknologi, serta implikasi geopolitik bagi Indonesia. Tema-tema ini kemudian dipetakan terhadap kerangka Pancasila guna menilai sejauh mana falsafah tersebut dapat dijadikan landasan konseptual dalam pembangunan pertahanan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan kontribusi konseptual dalam memperkuat paradigma kepemimpinan nasional berbasis Pancasila yakni kepemimpinan yang menempatkan nilai-nilai kemandirian, keadilan, dan gotong royong sebagai pedoman utama dalam pengelolaan sumber daya strategis. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah, TNI, industri pertahanan, serta aktor non-negara dalam merumuskan strategi pengelolaan SDA, SDM, dan teknologi yang berdaya saing, mandiri, serta mampu menjadi antitesis terhadap model kepemimpinan global yang hegemonik dan eksploitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika rivalitas global di kawasan Indo-Pasifik tidak hanya mencerminkan perebutan pengaruh antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia, tetapi juga menghadirkan tantangan strategis bagi kepemimpinan nasional Indonesia berbasis Pancasila dalam mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi nasional. Rivalitas tersebut terartikulasikan dalam bentuk perebutan jalur perdagangan maritim, investasi

pada mineral kritis, serta penetrasi diplomasi teknologi dan keamanan. Dengan posisi geografis yang strategis dan potensi sumber daya yang melimpah, Indonesia menjadi arena tarik-menarik kepentingan, sehingga menuntut model kepemimpinan nasional berbasis Pancasila yang mampu menegosiasikan kepentingan eksternal tanpa kehilangan kemandirian strategis.

1. Kepemimpinan Nasional berbasis Pancasila dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia menempati posisi strategis dalam konteks geopolitik global, mengingat Indonesia memiliki cadangan energi dan mineral kritis yang signifikan, termasuk nikel, bauksit, dan batubara. Pada kurun waktu tahun 2020–2024, produksi nikel mencapai 900 ribu ton nikel matte pada 2023, cadangan bauksit tercatat sebesar 123 juta ton, dan cadangan batubara mencapai 38 miliar ton (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024; BKPM, 2023). Sejak 2021, Tiongkok melalui proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) menanamkan investasi senilai USD 5 miliar untuk hilirisasi nikel di Sulawesi dan Maluku (Bank Dunia, 2022), sementara Amerika Serikat mendorong keterlibatan Indonesia dalam *Minerals Security Partnership* sejak 2022 untuk diversifikasi rantai pasok mineral kritis global (U.S. Geological Survey, 2023).

Merujuk pada teori ketahanan nasional menekankan bahwa pengelolaan SDA harus memperkuat kemandirian dan keamanan nasional sehingga ketergantungan berlebihan pada investor asing dapat menimbulkan kerentanan strategis (Suryadi, 2021). Perspektif geopolitik dan geostrategi menunjukkan bahwa posisi Indonesia sebagai produsen utama mineral kritis menjadikannya arena persaingan global, sehingga pengelolaan SDA dapat digunakan sebagai instrumen *leverage diplomatik* (Cohen & Tien, 2020; Yeo, 2021). Posisi strategis ini memungkinkan Indonesia untuk membangun kemitraan selektif yang seimbang dengan berbagai kekuatan global, memanfaatkan permintaan tinggi terhadap mineral kritis untuk memperkuat negosiasi perdagangan, teknologi, dan investasi. Namun, sekaligus hal ini menuntut kehati-hatian, karena keterikatan yang terlalu dalam pada satu pihak dapat menimbulkan ketergantungan struktural dan mengurangi fleksibilitas politik serta kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, kepemimpinan nasional berbasis Pancasila menekankan pengelolaan SDA yang seimbang antara kepentingan ekonomi, kedaulatan nasional, dan keadilan sosial, sehingga sumber daya strategis tidak hanya menjadi komoditas ekonomi, tetapi juga instrumen untuk memperkuat pertahanan, diplomasi, dan ketahanan nasional secara menyeluruh.

Kemudian teori pembangunan berkelanjutan menegaskan perlunya keseimbangan antara

pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan pemerataan sosial, sehingga Kepemimpinan nasional berbasis Pancasila mendorong pengelolaan SDA yang tidak hanya mengutamakan ekspor atau profit semata, tetapi juga penguatan kesejahteraan rakyat (UNESCO & UNDP, 2020). Dengan demikian, ketergantungan global terhadap energi dan mineral kritis menempatkan Indonesia sebagai pusat perhatian kekuatan besar; Tiongkok berupaya memperkuat posisinya melalui BRI dan proyek hilirisasi nikel, sementara Amerika Serikat mendorong keterlibatan Indonesia dalam *Minerals Security Partnership*. Persaingan ini menimbulkan dilema strategis bagi Indonesia, karena keterikatan pada satu pihak berpotensi mengurangi kemandirian dalam pengelolaan sumber daya.

Kepemimpinan nasional berbasis Pancasila menekankan prinsip kedaulatan dan keadilan sosial sehingga pengelolaan SDA tidak semata diarahkan pada keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai basis pertahanan dan ketahanan nasional, memungkinkan Indonesia memanfaatkan posisi strategisnya untuk membangun kemitraan seimbang, mengurangi ketergantungan berlebihan, dan memastikan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan bagi generasi mendatang.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketergantungan global terhadap energi dan mineral kritis, khususnya nikel, bauksit, dan batubara, menempatkan Indonesia sebagai pusat perhatian kekuatan besar. Tiongkok berupaya memperkuat posisinya melalui *Belt and Road Initiative* (BRI) dan proyek hilirisasi nikel, sementara Amerika Serikat mendorong keterlibatan Indonesia dalam *Minerals Security Partnership*. Persaingan ini berimplikasi pada dilema strategis bagi Indonesia, karena keterikatan pada satu pihak berpotensi mengurangi kemandirian dalam pengelolaan sumber daya. Di sinilah kepemimpinan nasional berbasis Pancasila menekankan prinsip kedaulatan dan keadilan sosial dalam mengelola kekayaan alam, sehingga pengelolaan SDA tidak semata diarahkan pada keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai basis pertahanan dan ketahanan nasional.

2. Kepemimpinan Nasional berbasis Pancasila dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) Indonesia menjadi faktor strategis dalam menghadapi kompetisi global, mengingat kualitas SDM menentukan kemampuan adaptasi terhadap arus teknologi, pendidikan, dan tenaga kerja internasional. Pada kurun waktu 2020–2024 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja dalam pendidikan tinggi

meningkat dari 36,7% pada 2020 menjadi 41,2% pada 2023, sementara indeks kualitas pendidikan nasional berada pada 66,5 poin (Badan Pusat Statistik (BPS), 2024). Selain itu, penyerapan tenaga kerja terampil dalam sektor teknologi dan industri manufaktur meningkat sebesar 8% per tahun, dengan jumlah pekerja terlatih mencapai 12 juta orang pada 2023 (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2023).

Berdasarkan teori ketahanan nasional, pembangunan SDM harus memperkuat kemandirian bangsa dan kapasitas pertahanan nasional, sehingga ketergantungan pada tenaga kerja asing atau standar internasional tidak menggerus identitas nasional (Kementerian Pertahanan RI, 2022; Lestari, D., 2021). Dalam perspektif teori pembangunan berkelanjutan, perlunya integrasi antara pendidikan, keterampilan, dan kesejahteraan sosial menjadi penting, sehingga peningkatan kapasitas SDM tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga mengedepankan keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab (UNESCO & UNDP, 2021; BPS, 2022). Hal ini berarti bahwa kebijakan pembangunan SDM harus dirancang secara holistik, tidak hanya menekankan peningkatan kompetensi teknis atau angka partisipasi pendidikan, tetapi juga memperkuat karakter, nilai-nilai kebangsaan, dan kapasitas adaptasi terhadap dinamika global. Pengembangan SDM yang seimbang antara hard skills, soft skills, dan kesadaran kewarganegaraan akan memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia mampu bersaing di pasar global sekaligus mempertahankan identitas nasional. Selain itu, integrasi pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesejahteraan sosial menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan regional, memperkuat inklusi sosial, dan meningkatkan daya tahan masyarakat terhadap tekanan eksternal, sehingga pembangunan SDM tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kemandirian bangsa dan ketahanan nasional secara menyeluruh.

Dalam teori *governance* dan kolaborasi multi-aktor, peran negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus seimbang dalam membangun SDM agar inovasi, transfer teknologi, dan pendidikan dapat diarahkan untuk kepentingan nasional tanpa terjebak pada agenda eksternal (OECD, 2021; World Bank, 2022). Hal ini menegaskan bahwa pembangunan SDM tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral, melainkan membutuhkan sinergi dan koordinasi lintas aktor. Negara berperan sebagai pengatur dan fasilitator kebijakan, sektor swasta menyediakan peluang kerja dan inovasi, sementara masyarakat sipil berperan dalam memastikan akuntabilitas, inklusi, dan adaptasi sosial. Sinergi ini memungkinkan inovasi dan transfer

teknologi untuk diadopsi secara efektif sesuai prioritas nasional, mencegah dominasi kepentingan asing atau agenda eksternal, serta meningkatkan kualitas tenaga kerja yang kompeten sekaligus berdaya saing global. Dengan demikian, kolaborasi multi-aktor menjadi instrumen strategis untuk membangun SDM yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran kewarganegaraan, etika profesional, dan orientasi pembangunan yang selaras dengan kepentingan nasional.

Dengan demikian, penelitian menemukan bahwa kompetisi global mendorong arus teknologi, pendidikan, dan tenaga kerja yang dapat menjadi peluang sekaligus ancaman. Di satu sisi, transfer teknologi dan kerja sama pendidikan membuka ruang percepatan pembangunan kapasitas nasional. Namun di sisi lain, dominasi standar dan agenda negara besar dapat menggeser orientasi pembangunan SDM Indonesia dari visi nasional menuju kepentingan eksternal. Kepemimpinan nasional berbasis Pancasila berperan penting dalam memastikan pembangunan SDM diarahkan untuk memperkuat kemandirian bangsa, menjunjung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta mengembangkan kapasitas pertahanan yang berbasis pada kekuatan rakyat.

3. Kepemimpinan Nasional berbasis Pancasila dalam pengelolaan teknologi dan inovasi strategis.

Pengelolaan teknologi dan inovasi strategis menjadi pilar penting bagi kedaulatan dan ketahanan nasional Indonesia dalam menghadapi dinamika kompetisi global. Data empiris periode 2020–2024 menunjukkan peningkatan investasi riset dan pengembangan (R&D) di Indonesia dari 0,18% PDB pada 2020 menjadi 0,28% PDB pada 2023 (Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2023), sementara jumlah paten teknologi yang didaftarkan meningkat dari 1.850 pada 2020 menjadi 2.750 pada 2023 (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2023). Selain itu, penetrasi teknologi digital di sektor pemerintahan dan industri strategis terus meningkat, dengan adopsi sistem kecerdasan buatan (AI) dan platform keamanan siber yang meningkat 12% per tahun (BPS, 2023).

Berdasarkan teori ketahanan nasional, penguasaan dan pengembangan teknologi strategis harus memperkuat kemandirian bangsa, sehingga ketergantungan pada negara atau korporasi asing tidak melemahkan kemampuan pertahanan dan inovasi nasional (Suryadi, A., 2022). Perspektif geopolitik dan geostrategi menekankan bahwa posisi Indonesia sebagai negara berkembang dengan sumber daya teknologi terbatas menjadikannya medan kontestasi global,

khususnya dalam kecerdasan buatan, sistem pertahanan siber, dan teknologi maritim, sehingga keputusan kemitraan strategis harus berhati-hati untuk menghindari ketergantungan jangka panjang (Cohen, B., & Tien, 2020; Yeo, L., 2021).

Posisi strategis ini memungkinkan Indonesia untuk memainkan peran sebagai mediator dan penyeimbang dalam persaingan teknologi global, dengan memanfaatkan inovasi untuk kepentingan nasional sekaligus membangun kapasitas pertahanan yang mandiri. Pendekatan yang selektif terhadap kemitraan asing serta fokus pada pengembangan inovasi lokal akan memperkuat kedaulatan teknologi, mendorong transfer pengetahuan yang bermanfaat, dan mencegah dominasi teknologi asing yang dapat menggeser prioritas pembangunan nasional.

Teori pembangunan berkelanjutan menekankan perlunya integrasi antara inovasi teknologi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pengembangan teknologi strategis tidak hanya untuk tujuan militer atau ekonomi semata, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan kesejahteraan (UNESCO & UNDP, 2021; World Bank, 2022). Pendekatan ini menekankan bahwa setiap investasi dan pengembangan teknologi strategis harus selaras dengan kebutuhan sosial, akses pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga manfaat teknologi tersebar secara adil. Dengan demikian, inovasi tidak hanya memperkuat kapasitas nasional dan daya saing global, tetapi juga mendukung kesejahteraan rakyat, inklusi sosial, dan ketahanan nasional secara menyeluruh.

Dengan demikian, kontestasi global terlihat pada bagaimana Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia berkompetisi dalam kecerdasan buatan, sistem pertahanan siber, dan teknologi maritim. Indonesia berhadapan dengan tekanan untuk memilih mitra strategis dalam pengembangan teknologi, padahal pilihan yang keliru dapat menimbulkan ketergantungan jangka panjang. Penelitian ini menegaskan perlunya strategi teknologi nasional yang berpijak pada nilai Pancasila, yakni menjadikan inovasi sebagai instrumen untuk menjaga kemandirian bangsa, memperkuat pertahanan negara, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat.

4. Kepemimpinan Berbasis Pancasila dalam Pengelolaan Geopolitik Maritim.

Geopolitik maritim menjadi elemen strategis bagi kedaulatan dan stabilitas regional Indonesia, mengingat posisi negara ini yang berada di jalur perdagangan utama Indo-Pasifik. Pada periode 2020–2024, volume perdagangan maritim Indonesia meningkat dari 6,2 miliar ton pada 2020 menjadi 6,9 miliar ton pada 2023 (Kementerian Perhubungan, 2023), sementara patroli dan pengawasan perairan oleh TNI AL mencatat 3.450 operasi keamanan laut pada 2023

(TNI Angkatan Laut, 2023). Selain itu, investasi infrastruktur maritim melalui program tol laut mencapai total Rp 35 triliun antara 2020–2023, mendukung konektivitas antar-pulau dan distribusi logistik nasional (Kementerian Perhubungan, 2023).

Teori geopolitik dan geostrategi menekankan bahwa posisi Indonesia di Selat Malaka, Laut Natuna, dan perairan Sulawesi menjadikannya kunci stabilitas regional sekaligus target penetrasi kekuatan besar, sehingga pengelolaan geopolitik maritim harus berpijak pada kepentingan nasional dan keseimbangan kekuatan regional (Cohen, B., & Tien, L., 2020; Yeo, L., 2021). Perspektif teori ketahanan nasional menegaskan bahwa penguasaan ruang maritim dan pengembangan kemampuan pertahanan laut merupakan prasyarat bagi kemandirian dan keamanan negara, sehingga manuver diplomasi maritim harus memperkuat posisi Indonesia sebagai penyeimbang di kawasan (Kementerian Pertahanan RI, 2022). Pendekatan *governance* maritim dan kolaborasi multi-aktor juga menunjukkan perlunya sinergi antara pemerintah, TNI AL, sektor swasta, dan masyarakat pesisir dalam menjaga keamanan, memaksimalkan potensi ekonomi, serta memastikan kelestarian sumber daya laut (OECD, 2021; World Bank, 2022).

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa jalur maritim Indo-Pasifik tetap menjadi arena utama perebutan pengaruh. Posisi Indonesia di Selat Malaka, Laut Natuna, dan perairan Sulawesi menjadikannya sebagai kunci stabilitas regional sekaligus target penetrasi kekuatan besar. Rivalitas ini dapat meningkatkan risiko konflik, namun sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran kepemimpinan regional. Dengan mengedepankan paradigma kepemimpinan nasional berbasis Pancasila, Indonesia dapat menampilkan peran sebagai penyeimbang (*balancer*) yang menolak hegemoni dan mengutamakan kerja sama multipihak, sesuai dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia, dan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pendekatan strategis ini menekankan bahwa diplomasi maritim harus selaras dengan pembangunan kapasitas pertahanan, perlindungan sumber daya laut, dan pemberdayaan masyarakat pesisir, sehingga Indonesia dapat menjaga kedaulatan, memaksimalkan keuntungan ekonomi, dan sekaligus memperkuat stabilitas regional secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan nasional berbasis Pancasila menjadi landasan strategis dalam menghadapi dinamika global dan tantangan

domestik di bidang sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan inovasi strategis, serta geopolitik maritim. Pengelolaan SDA yang berpijak pada kedaulatan dan keadilan sosial memungkinkan Indonesia memanfaatkan posisinya sebagai produsen mineral kritis untuk memperkuat leverage diplomatik dan kemandirian ekonomi. Pengembangan SDM yang terintegrasi dengan pendidikan, keterampilan, kesejahteraan sosial, dan nilai-nilai kebangsaan memastikan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, berkarakter, dan berdaya saing global. Peningkatan kapasitas teknologi strategis dan inovasi nasional, disertai kolaborasi multi-aktor, memperkuat pertahanan dan posisi negosiasi Indonesia di arena global tanpa terjebak pada ketergantungan eksternal. Sementara itu, pengelolaan geopolitik maritim yang berpijak pada kepentingan nasional, kedaulatan wilayah, dan kolaborasi multi-aktor menjadikan Indonesia sebagai penyeimbang (balancer) regional, mampu menghadapi tekanan kekuatan besar sekaligus memaksimalkan peluang stabilitas dan kesejahteraan rakyat.

Keseluruhan temuan menegaskan bahwa penerapan nilai Pancasila dalam kepemimpinan strategis bukan hanya simbolik, tetapi berfungsi sebagai instrumen praktis untuk menjaga kemandirian bangsa, memperkuat pertahanan, memanfaatkan peluang global, dan meminimalkan risiko ketergantungan eksternal.

Saran

Saran yang dapat disampaikan adalah Kepada Pemerintah Pusat, termasuk kementerian dan lembaga terkait, perlu diperkuat kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi strategis yang berpijak pada kedaulatan nasional dan nilai-nilai Pancasila, termasuk melalui strategi hilirisasi mineral kritis dan investasi inovasi lokal. Pemerintah juga harus menetapkan program pengembangan SDM terintegrasi yang menekankan peningkatan keterampilan, pembinaan karakter kebangsaan, dan kesiapan menghadapi dinamika global, dengan prioritas bagi sektor strategis dan pertahanan, sekaligus mengoptimalkan diplomasi maritim dan kerja sama multipihak di kawasan Indo-Pasifik untuk memanfaatkan posisi geografis Indonesia demi stabilitas regional tanpa terjebak dominasi kekuatan besar.

Kepada TNI, kapasitas pertahanan berbasis inovasi teknologi nasional dan kolaborasi multi-aktor harus terus diperkuat, sehingga kesiapan menghadapi ancaman konvensional maupun non-konvensional meningkat, sementara pengawasan maritim, keamanan wilayah, dan pembangunan kapasitas masyarakat pesisir dapat diintegrasikan dalam satu strategi terpadu.

Bagi Sektor swasta dan akademisi didorong untuk menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah dan masyarakat dalam inovasi teknologi, R&D, dan pengembangan SDM, dengan fokus pada transfer pengetahuan yang memperkuat kemandirian nasional, serta menghasilkan penelitian dan inovasi yang relevan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan nasional.

Kemudian, agar masyarakat dan organisasi sipil memiliki peran aktif dalam pengawasan, advokasi, dan kolaborasi agar pengelolaan SDA, SDM, dan teknologi strategis selaras dengan kepentingan nasional dan nilai-nilai Pancasila, sekaligus mengembangkan kesadaran publik tentang pentingnya kedaulatan sumber daya, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari ketahanan nasional. Saran-saran ini bersifat aplikatif, konkret, dan menekankan peran masing-masing aktor agar kepemimpinan nasional berbasis Pancasila dapat diwujudkan secara efektif dalam praktik pengelolaan sumber daya strategis Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Dunia. (2022). *Global mineral supply chains: Investment and sustainability*. World Bank Publications.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Statistik pendidikan dan ketenagakerjaan Indonesia 2022*. BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Indikator pembangunan manusia dan penetrasi teknologi digital 2023*. BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Statistik ketenagakerjaan dan pendidikan tinggi 2024*. BPS.
- BKPM. (2023). *Laporan investasi sektor mineral dan energi 2023*. Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Cohen, B., & Tien, L. (2020). *Strategic geopolitics and resource management in Asia-Pacific*. Routledge.
- Creswell, J. W. (2021). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2023). *Laporan pendaftaran paten dan inovasi 2023*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Kaplan, R. D. (2021). *The return of geopolitics: Global power struggles in the 21st century*. Random House.

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024). *Laporan produksi dan cadangan mineral strategis 2024*. Kementerian ESDM RI.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2023). *Statistik tenaga kerja terampil 2023*. Kementerian Ketenagakerjaan RI.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2023). *Laporan perdagangan maritim dan tol laut 2023*. Kementerian Perhubungan RI.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2022). *Strategi pertahanan nasional dan pembangunan SDM 2022*. Kementerian Pertahanan RI.
- Lestari, D. (2021). *Kemandirian SDM dan ketahanan nasional: Perspektif Indonesia*. Jurnal Ilmu Pertahanan, 13(2), 45–61.
- Medcalf, R. (2022). *Indo-Pacific and the geopolitics of power*. Lowy Institute.
- OECD. (2021). *Governance and multi-stakeholder collaboration in human capital development*. OECD Publishing.
- Storey, I. (2020). *Asia-Pacific strategic review 2020: Regional rivalries and maritime security*. ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Alfabeta ed.). Alfabeta.
- Suryadi, A. (2021). *Ketahanan nasional dan pengembangan SDM strategis di Indonesia*. Pustaka Strategis.
- Suryadi, A. (2022). *Teknologi strategis dan kemandirian pertahanan nasional*. Jurnal Pertahanan Nasional, 14(1), 23–41.
- UNESCO & UNDP. (2020). *Sustainable development and resource governance in Asia-Pacific*. UNESCO & UNDP Publications.
- UNESCO & UNDP. (2021). *Integrating technology, education, and social welfare for sustainable development*. UNESCO & UNDP.
- UNCTAD. (2023). *Review of maritime trade and logistics in the Indo-Pacific 2023*. United Nations Conference on Trade and Development.
- USGS (U.S. Geological Survey). (2023). *Mineral commodity summaries 2023: Nickel, cobalt, and critical minerals*. USGS.
- World Bank. (2022). *Global technology transfer and innovation partnerships: Policy brief*. World Bank Publications.
- Yeo, L. (2021). *Geopolitics of strategic resources: Southeast Asia in the global arena*.

Routledge.